

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PATI NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

- a. Tujuan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

2. RUANG LINGKUP

- a. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).

- c. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- d. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

3. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
 - a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo Anggaran Lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan

kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

E. STRUKTUR DAN ISI

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus/Defisit-LRA;

- 5) Pembiayaan;
 - 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1) LRA PEMDA Format PP 71/2010

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN - LRA | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN - LRA | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA- LRA | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 20 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 21 | | | | | |
| 22 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI- LRA | | | | |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 25 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi- LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 26 | Total Pendapatan Transfer - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 27 | | | | | |
| 28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA | | | | |
| 29 | Pendapatan Hibah - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 31 | Pendapatan Lainnya - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 32 | Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 33 | JUMLAH PENDAPATAN - LRA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 34 | | | | | |
| 35 | BELANJA | | | | |
| 36 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 37 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xx | xxx |
| 38 | Belanja Barang | xxx | xxx | xx | xxx |
| 39 | Bunga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 40 | Subsidi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 41 | Hibah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 42 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xx | xxx |
| 43 | Jumlah Belanja Operasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 44 | | | | | |
| 45 | BELANJA MODAL | | | | |
| 46 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 47 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xx | xxx |
| 48 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 49 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 50 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 51 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 52 | Jumlah Belanja Modal | xxx | xxx | xx | xxx |
| 53 | | | | | |
| 54 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 55 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 56 | Jumlah Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 57 | | | | | |
| 58 | TRANSFER | | | | |
| 59 | TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA | | | | |
| 60 | Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xx | xxx |
| 61 | Bagi Hasil Retribusi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 62 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 63 | Jumlah Transfer /Bagi Hasil Ke Desa | xxx | xxx | xx | xxx |
| 64 | JUMLAH BELANJA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 65 | | | | | |
| 66 | SURPLUS / DEFISIT | xxx | xxx | xx | xxx |

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 67 | | | | | |
| 68 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 71 | Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 72 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 73 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 74 | Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 75 | Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 76 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 77 | Pinjaman Dalam Negeri – Lemabaga Keuangan Bukan bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 78 | Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 79 | Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 80 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| 81 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 82 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 83 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 84 | | | | | |
| 85 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 86 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 87 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 88 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 89 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 90 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 91 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 92 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 93 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 94 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| 95 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 96 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 97 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 98 | PEMBIAYAAN NETTO | xxx | xxx | xx | xxx |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | xxx | xxx | xx | xxx |

- 2) LRA PEMDA format Permendagri 13/2006 yang terakhir diubah dengan Permendagri 21/2011

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 20X1 | REALISASI 20X1 | LEBIH/ (KURANG) |
|-------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | PENDAPATAN | xxx | xxx | xxx |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.4 | Lain-Lain PAD yang Sah | | | |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.2 | Dana Darurat | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx |
| 2 | BELANJA | xxx | xxx | xxx |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.5 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.8 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.9 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xxx |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.3 | Belanja Modal | xxx | xxx | xxx |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | xxx | xxx | xxx |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dst.... | xxx | xxx | xxx |

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 20X1 | REALISASI 20X1 | LEBIH/ (KURANG) |
|-------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang dst..... | xxx | xxx | xxx |
| | PEMBIAYAAN NETTO | xxx | xxx | xxx |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | xxx | xxx | xxx |

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
 - 5) Lain-lain;
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- b. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Pati

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | xxx | xxx |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | (xxx) | (xxx) |
| 3 | Subtotal (1 – 2) | xxx | xxx |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | xxx | xxx |
| 5 | Subtotal (3 + 4) | xxx | xxx |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | xxx | xxx |
| 7 | Lain-lain | xxx | xxx |
| 8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir | xxx | xxx |

3. NERACA

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
- c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- d. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - 1) Kas dan setara kas;
 - 2) Investasi jangka pendek;
 - 3) Piutang;
 - 4) Persediaan;
 - 5) Investasi jangka panjang;
 - 6) Aset tetap;
 - 7) Aset lainnya;
 - 8) Kewajiban jangka pendek;
 - 9) Kewajiban jangka panjang;
 - 10) Ekuitas.
- e. Contoh format Neraca sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut
:

Format Neraca Pemerintah Kabupaten Pati

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | ASET | | |
| 2 | | | |
| 3 | ASET LANCAR | | |
| 4 | Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| 6 | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| 7 | Kas di BLUD | | |
| 8 | Kas Lainnya | | |
| 9 | Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| 10 | Piutang Pajak | xxx | xxx |
| 11 | Piutang Retribusi | xxx | xxx |
| 12 | Piutang Lainnya | | |
| 13 | Penyisihan Piutang | (xxx) | (xxx) |
| 14 | Belanja Dibayar Dimuka | xxx | xxx |
| 15 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 16 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| 17 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| 18 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 19 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 20 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 21 | Persediaan | xxx | xxx |
| 22 | Jumlah Aset Lancar (4 s/d 21) | xxx | xxx |
| 23 | | | |
| 24 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 25 | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | |
| 26 | Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | xxx | xxx |
| 27 | Investasi dalam Surat Berharga | xxx | xxx |
| 28 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| 29 | Dana Bergulir | | |
| 30 | Deposito Jangka Panjang | | |
| 31 | Investasi Non Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| 32 | Jumlah Investasi Non Permanen (26 s/d 31) | xxx | xxx |
| 33 | Investasi Jangka Panjang Permanen | | |
| 34 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| 35 | Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| 36 | Jumlah Investasi Permanen (34 s/d 35) | xxx | xxx |
| 37 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (32 + 36) | xxx | xxx |
| 38 | | | |
| 39 | ASET TETAP | | |
| 40 | Tanah | xxx | xxx |
| 41 | Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 42 | Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| 43 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| 44 | Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| 45 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| 46 | Akumulasi Penyusutan | (xxx) | (xxx) |
| 47 | Jumlah Aset Tetap (40 s/d 46) | xxx | xxx |
| 48 | | | |
| 49 | DANA CADANGAN | | |
| 50 | Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 51 | Jumlah Dana Cadangan (50) | xxx | xxx |
| 52 | | | |
| 53 | ASET LAINNYA | | |
| 54 | Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 55 | Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 56 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx | xxx |
| 57 | Aset Tidak Berwujud | xxx | xxx |
| 58 | Aset Lain-lain | xxx | xxx |
| 59 | Jumlah Aset Lainnya (54 s/d 58) | xxx | xxx |
| 60 | | | |
| 61 | JUMLAH ASET (22 + 37 + 47 + 51 + 59) | xxx | xxx |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|------------|------------|
| 62 | | | |
| 63 | KEWAJIBAN | | |
| 64 | | | |
| 65 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 66 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | xxx | xxx |
| 67 | Utang Bunga | xxx | xxx |
| 68 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | xxx | xxx |
| 69 | Pendapatan Diterima Dimuka | xxx | xxx |
| 70 | Utang Beban | xxx | xxx |
| 71 | Utang Jangka Pendek Lainnya | xxx | xxx |
| 72 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (66 + 71) | xxx | xxx |
| 73 | | | |
| 74 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 75 | Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan | xxx | xxx |
| 76 | Utang Dalam Negeri – Obligasi | xxx | xxx |
| 77 | Premium (Diskonto) Obligasi | xxx | xxx |
| 78 | Utang jangka Panjang Lainnya | xxx | xxx |
| 79 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (75s/d 78) | xxx | xxx |
| 80 | JUMLAH KEWAJIBAN (72 + 79) | xxx | xxx |
| 81 | | | |
| 82 | EKUITAS | | |
| 83 | EKUITAS | xxx | xxx |
| 84 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (80 + 83) | xxx | xxx |

4. LAPORAN OPERASIONAL

- a. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- b. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:
 - 1) Nama entitas pelaporan dan sarana identifikasi lainnya;
 - 2) Cakupan entitas pelaporan;
 - 3) Periode yang dicakup;
 - 4) Mata uang pelaporan; dan
 - 5) Satuan angka yang digunakan.
- d. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - 2) Beban dari kegiatan operasional;
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - 4) Kegiatan Non Operasional;
 - 5) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 6) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - 7) Pos luar biasa;
 - 8) Surplus/defisit-LO.
- e. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
- f. Contoh format Laporan Operasional sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Pati

PEMERINTAH KABUPATEN PATI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|------------------------------------|---|------------|------------|--------------------------|-----------|
| <u>KEGIATAN OPERASIONAL</u> | | | | | |
| 1 | <u>PENDAPATAN - LO</u> | xxx | xxx | xxx | xx |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 6 | Lain-lain PAD Yang sah - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 7 | | | | | |
| 8 | PENDAPATAN TRANSFER - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 9 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 10 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 11 | Pemerintah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 12 | Bantuan Keuangan - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 13 | | | | | |
| 14 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 15 | Pendapatan Hibah - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 16 | Dana Darurat - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 17 | Pendapatan Lainnya - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 18 | | | | | |
| 19 | <u>BEBAN</u> | xxx | xxx | xxx | xx |
| 20 | Beban Pegawai - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 21 | Beban Barang dan Jasa | xxx | xxx | xxx | xx |
| 22 | Beban Bunga | xxx | xxx | xxx | xx |
| 23 | Beban Subsidi | xxx | xxx | xxx | xx |
| 24 | Beban Hibah | xxx | xxx | xxx | xx |
| 25 | Beban Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xx |
| 26 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | xxx | xxx | xxx | xx |
| 27 | Beban Penyisihan Piutang | xxx | xxx | xxx | xx |
| 28 | Beban Lain-lain | xxx | xxx | xxx | xx |
| 29 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | | | | |
| 30 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xx |
| 31 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xx |
| 32 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | xxx | xxx | xxx | xx |
| 33 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xx |
| 34 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xx |
| 35 | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | xxx | xxx | xxx | xx |
| 36 | | | | | |
| 37 | <u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u> | | | | |
| 38 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 39 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 40 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 41 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 42 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 43 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 44 | | | | | |
| 45 | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL- LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 46 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | xxx | xxx | xxx | xx |
| 47 | | | | | |
| 48 | <u>POS LUAR BIASA</u> | | | | |
| 49 | Pendapatan Luar Biasa– LO | xxx | xxx | xxx | xx |
| 50 | Beban Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xx |
| 51 | SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | xxx | xxx | xxx | xx |
| 52 | SURPLUS/DEFISIT – LO | xxx | xxx | xxx | xx |

5. LAPORAN ARUS KAS

- a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

- a. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain :
 - 1) Penerimaan Perpajakan;
 - 2) Penerimaan Retribusi;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Penerimaan Transfer;
 - 5) Penerimaan Hibah;
 - 6) Penerimaan Dana Darurat;
 - 7) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa.
- c. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial;
 - 7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga;
 - 8) Transfer Keluar; dan
 - 9) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.

Aktivitas Investasi

- a. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penjualan Aset Tetap;
 - 2) Penjualan Aset Lainnya;
 - 3) Pencairan Dana Cadangan;
 - 4) Penerimaan dari Divestasi;
 - 5) Penjualan Investasi Non Permanen.
- d. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - 1) Perolehan Aset Tetap;
 - 2) Perolehan Aset Lainnya;
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 4) Penyertaan Modal Pemerintah;
 - 5) Pembelian Investasi Non Permanen.

Aktivitas Pendanaan

- a. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - 1) Penerimaan Utang Luar Negeri;
 - 2) Penerimaan dari Utang Dalam Negeri;
 - 3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
 - 4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain :
 - 1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 - 2) Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri;
 - 3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah;
 - 4) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada Perusahaan Negara/Daerah.

Aktivitas Transitoris

- a. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- b. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
- c. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- d. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
- e. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
- f. Format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Pati

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------------|------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 | Arus Kas Masuk | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx |
| 7 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| 8 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx |
| 9 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx |
| 10 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx |
| 11 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx |
| 12 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx |
| 13 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| 14 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx |
| 15 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx |
| 16 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx |
| 17 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx |
| 18 | Pendapatan dari Pendapatan Luar Biasa | xxx | xxx |
| 19 | Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 18) | xxx | xxx |
| 20 | Arus Kas Keluar | | |
| 21 | Belanja Pegawai | xxx | xxx |
| 22 | Belanja Barang | xxx | xxx |
| 23 | Belanja Bunga | xxx | xxx |
| 24 | Belanja Subsidi | xxx | xxx |
| 25 | Belanja Hibah | xxx | xxx |
| 26 | Belanja Bantuan Sosial | xxx | xxx |
| 27 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx |
| 28 | Belanja Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| 29 | Belanja Bagi Hasil Retribusi | xxx | xxx |
| 30 | Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx |
| 31 | Belanja Kejadian Luar Biasa | xxx | xxx |
| 32 | Jumlah Arus Kas Keluar (21 s/d 31) | xxx | xxx |
| 33 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 – 32) | xxx | xxx |
| 34 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | | |
| 35 | Arus Kas Masuk | | |
| 36 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 37 | Penjualan atas Tanah | xxx | xxx |
| 38 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 39 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| 40 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| 41 | Penjualan Aset Tetap | xxx | xxx |
| 42 | Penjualan Aset Lainnya | xxx | xxx |
| 43 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx |
| 44 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | xxx | xxx |
| 45 | Jumlah Arus Kas Masuk (36 s/d 44) | xxx | xxx |
| 46 | Arus Kas Keluar | xxx | xxx |
| 47 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 48 | Belanja Tanah | xxx | xxx |
| 49 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 50 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| 51 | Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan | xxx | xxx |
| 52 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| 53 | Belanja Aset lainnya | xxx | xxx |
| 54 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| 55 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | xxx | xxx |
| 56 | Jumlah Arus Kas Keluar (47 s/d 55) | xxx | xxx |
| 57 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (45 – 56) | xxx | xxx |
| 58 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | | |
| 59 | Arus Kas Masuk | | |
| 60 | Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| 61 | Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 62 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx |
| 63 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | xxx | xxx |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|------------|------------|
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | xxx | xxx |
| 66 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 67 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 69 | Jumlah Arus Kas Masuk (60 s/d 68) | xxx | xxx |
| 70 | Arus Kas Keluar | | |
| 71 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| 72 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 73 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx |
| 74 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx |
| 75 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | xxx | xxx |
| 76 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | xxx | xxx |
| 77 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 78 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| 79 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 80 | Jumlah Arus Kas Keluar (71 s/d 79) | xxx | xxx |
| 81 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 – 80) | xxx | xxx |
| 82 | Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran | | |
| 83 | Arus Kas Masuk | | |
| 84 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | xxx | xxx |
| 85 | Jumlah Arus Kas Masuk (84) | xxx | xxx |
| 86 | Arus Kas Keluar | | |
| 87 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | xxx | xxx |
| 88 | Jumlah Arus Keluar Kas (87) | xxx | xxx |
| 89 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (85 – 88) | xxx | xxx |
| 90 | Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89) | xxx | xxx |
| 91 | Saldo Awal Kas di BUD | xxx | xxx |
| 92 | Saldo Akhir Kas di BUD | xxx | xxx |
| 93 | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| 94 | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| 95 | Kas di BLUD | xxx | xxx |
| 96 | Kas Lainnya | xxx | xxx |
| 97 | Saldo Akhir Kas | xxx | xxx |

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
- b. Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|------|------|
| 1 | EKUITAS AWAL | xxx | xxx |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT – LO | xxx | xxx |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : | | |
| 4 | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | xxx | xxx |
| 5 | SELISIH REVALUASI ASET TETAP | xxx | xxx |
| 6 | LAIN-LAIN | xxx | xxx |
| 7 | EKUITAS AKHIR | xxx | xxx |

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut :
- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - 2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - 4) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - a) Entitas akuntansi/pelaporan;
 - b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - 5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - 6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;
 - 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:
 - 1) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - 3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- d. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.
- e. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengakuan pendapatan-LRA;
 - 2) Pengakuan pendapatan-LO;
 - 3) Pengakuan belanja;
 - 4) Pengakuan beban;
 - 5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - 6) Investasi;
 - 7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - 8) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - 9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - 10) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 11) Biaya penelitian dan pengembangan;

- 12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - 13) Dana cadangan;
 - 14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- f. Format Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

**PEMERINTAH KABUPATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD**

| | | |
|---------|---|---|
| Bab I | Pendahuluan | |
| | 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD |
| Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD | |
| | 2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional |
| | 2.2 | Kebijakan keuangan |
| | 2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD | |
| | 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD |
| | 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab IV | Kebijakan akuntansi | |
| | 4.1 | Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD |
| | 4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD |
| | 4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu |
| Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD | |
| | 5.1 | LRA |
| | 5.1.1 | Pendapatan - LRA |
| | 5.1.2 | Belanja |
| | 5.2 | LO |
| | 5.2.1 | Pendapatan -LO |
| | 5.2.1 | Beban |
| | 5.2.3 | Kegiatan Non Operasional |
| | 5.2.4 | Pos Luar Biasa |
| | 5.3 | Laporan Perubahan Ekuitas |
| | 5.1.8 | Perubahan Ekuitas |
| | 5.4 | Neraca |
| | 5.1.9 | Aset |
| | 5.1.10 | Kewajiban |
| | 5.1.11 | Ekuitas |
| Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD | |
| Bab VII | Penutup | |

2) Catatan atas Laporan Keuangan PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD

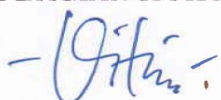
| | | |
|---------|---|---|
| Bab I | Pendahuluan | |
| | 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD |
| | 1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD |
| | 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD |
| Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD | |
| | 2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional |
| | 2.2 | Kebijakan keuangan |
| | 2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD | |
| | 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD |
| | 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab IV | Kebijakan akuntansi | |
| | 4.1 | Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah PPKD |
| | 4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD |
| | 4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD |
| | 4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD |
| | 4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu |
| Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD | |
| | 5.1 | LRA |
| | | 5.1.1 Pendapatan-LRA |
| | | 5.1.2 Belanja |
| | | 5.1.3 Pembiayaan |
| | 5.2 | LO |
| | | 5.1.4 Pendapatan-LO |
| | | 5.1.5 Beban |
| | | 5.1.6 Kegiatan Non Operasional |
| | | 5.1.7 Pos Luar Biasa |
| | 5.3 | Laporan Perubahan Ekuitas |
| | | 5.1.8 Perubahan Ekuitas |
| | 5.4 | Neraca |
| | | 5.4.1 Aset |
| | | 5.4.2 Kewajiban |
| | | 5.4.3 Ekuitas |
| | 5.5 | Laporan Arus Kas |
| | | 5.5.1 Arus Kas dari Operasi |
| | | 5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan |
| | | 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan |
| | | 5.5.4 Arus Kas dari AKTivitas Transitoris |
| Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD | |
| Bab VII | Penutup | |

3) Catatan atas Laporan Keuangan PEMDA

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

| | | | |
|---------|--|---|---|
| Bab I | Pendahuluan | | |
| | 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan | |
| | 1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan | |
| | 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan | |
| Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD | | |
| | 2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional | |
| | 2.2 | Kebijakan keuangan | |
| | 2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD | |
| Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan | | |
| | 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan | |
| | 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan | |
| Bab IV | Kebijakan akuntansi | | |
| | 4.1 | Entitas pelaporan | |
| | 4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan | |
| | 4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan | |
| | 4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP | |
| | 4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu | |
| Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan | | |
| | 5.1 | LRA | |
| | | 5.1.1 | Pendapatan-LRA |
| | | 5.1.2 | Belanja |
| | | 5.1.3 | Pembiayaan |
| | 5.2 | Laporan Perubahan SAL | |
| | | 5.2.1 | Perubahan SAL |
| | 5.3 | LO | |
| | | 5.3.1 | Pendapatan-LO |
| | | 5.3.2 | Beban |
| | | 5.3.2 | Kegiatan Non Operasional |
| | | 5.3.4 | Pos Luar Biasa |
| | 5.4 | Laporan Perubahan Ekuitas | |
| | | 5.4.1 | Perubahan Ekuitas |
| | 5.5 | Neraca | |
| | | 5.5.1 | Aset |
| | | 5.5.2 | Kewajiban |
| | | 5.5.3 | Ekuitas |
| | 5.6 | Laporan Arus Kas | |
| | | 5.6.1 | Arus Kas dari Operasi |
| | | 5.6.2 | Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan |
| | | 5.6.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan |
| | | 5.6.4 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris |
| Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan | | |
| Bab VII | Penutup | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

Plt. BUPATI PATI,

WAKIL BUPATI

ttd.

BUDIYONO